



Legislator Desak Dinas SDA Bersihkan Waduk Pluit

Gambar, Warta Kota

Komisi D DPRD DKI Jakarta akan melaporkan kondisi terkini dari Waduk Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Hariwan Paloh menilai, dua alat berat yang dikerahkan dianggap kurang untuk merawat waduk seluas 80 hektare tersebut. Dia meminta kepada dinas terkait untuk turun tangan, karena Waduk Pluit sangat diandalkan untuk mencegah banjir di wilayah Jakarta Utara.

Disebutkan, saat ini kondisi permukaan air di Waduk Pluit dipenuhi tanaman eceng gondok dan sampah. Meski dipenuhi eceng gondok dan sampah, namun pria yang juga menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta ogah menyebut adanya pembiaran dari Dinas SDA dan LH.

"Nanti saya akan koordinasi lagi, artinya ini memang harus ditambahkan (alat berat) karena kalau luasan itu kan harus dikoordinasi dengan UPK Badan Air," ujar Nova pada Minggu (16/7).

Hal senada juga diungkap Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Komisi D DPRD DKI Jakarta dari PDIP Yuke

Dia menduga, alat berat yang dimiliki dinas sedang difungsikan untuk penanganan di tempat lain yang lebih urgen.

Yurike meminta eksekutif untuk membersihkan Waduk Pluit dari eceng gondok dan sampah. Ia menyayangkan, lemahnya pengawasan dan perawatan dari dinas. "Sebenarnya tentu ini sangat disayangkan ya kalau kondisinya kembali seperti ini. Sempat dikeruk dan dibersihkan, ternyata saat ini kembali seperti ini," ujar anggota

Menurut dia, harusnya Waduk Pluit rutin dibersihkan dan sedimentasinya kerap dikeruk agar daya tampung air lebih maksimal. Namun ternyata dalam beberapa tahun ini terbelengkalai.

"Di musim kering saat ini, seharusnya waktu yang tepat untuk melakukan pembersihan dan juga pengerukan kembali, sehingga bisa berfungsi maksimal di musim penghujan," kata Bendahara Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini.

Sementara, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mengatakan, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk merawat Waduk Pluit.

Diakui Nirwono, Waduk Pluit memang tidak terawat dengan baik di era Gubernur Anies

Baswedan karena keterbatasan anggaran.

"Dengan adanya Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang notabene saat itu menjadi Wali Kota Jakarta Utara saat revitalisasi Waduk Pluit di era Pak Jokowi, maka beliau punya tanggung jawab moral untuk merawat waduk," kata Nirwono.

"Pemprov DKI atau Dinas SDA harus lebih optimal memelihara, merawat pompa, dan kebersihan waduk, memberdayakan masyarakat sekitar waduk untuk mengolah eceng gondok, agar bernilai ekonomi sekaligus mengurangi beban waduk," jelasnya. Banyaknya tanaman eceng gondok dan sampah di permukaan air Waduk Pluit juga diakui salah seroang warga, Pamungkas. Ia mengaku risih saat melihat kondisi Waduk Pluit saat ini. Dia yang tengah melintas di sekitar waduk awalnya menganggap, area seluas 80 hektare itu merupakan lapangan sepakbola.

"Dari kejauhan kayak lapangan sepakbola, tapi pas dilihat dari dekat, itu rupanya tanaman eceng gondok yang menutupi permukaan air," kata Pamungkas pada Minggu (16/7). (faf)